

Ungkap Potensi Kawasan Ekonomi Khusus dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusif

Chrisna Satya Wardhana

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Politik
Pemerintahan, Institut Pemerintahan dalam Negeri, Sumedang, Indonesia
E-mail: cswardhana75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia melalui tinjauan literatur. Temuan utama menunjukkan bahwa KEK berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan menciptakan efek pengganda bagi perekonomian lokal. Untuk mewujudkan ekonomi inklusif, KEK perlu mengintegrasikan pembangunan berbasis wilayah, menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan, dan memperkuat keterkaitan dengan sektor ekonomi lokal. Namun, terdapat tantangan seperti konsentrasi manfaat pada perusahaan besar, eksploitasi sumber daya, dan kurangnya integrasi dengan ekonomi lokal. Solusi yang diusulkan meliputi adopsi ekonomi sirkular, fasilitasi kewirausahaan lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan, pelatihan, dan jaringan bisnis. Upaya komprehensif diperlukan untuk memaksimalkan potensi KEK dalam mencapai ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Inklusif; Ekonomi Berkelanjutan; Kawasan Ekonomi Khusus; Pembangunan Wilayah.

Abstract

This research examines the potential of Special Economic Zones (KEK) in realizing an inclusive economy in Indonesia through literature observations. The main findings show that SEZs act as a catalyst for economic growth by attracting investment and creating a multiplier effect for the local economy. To realize an inclusive economy, SEZs need to integrate region-based development, implement a sustainable economy, and strengthen the principle of linkages with local economic sectors. However, there are challenges such as concentration of benefits in large companies, exploitation of resources, and weakening integration with local economies. The proposed solutions include implementing a circular economy, supporting local entrepreneurship, and increasing community access to financing, training and business networks. Comprehensive efforts are needed to maximize the potential of SEZs in achieving a sustainable, inclusive economy.

Keywords: *Inclusive Economy; Sustainable Economy; Special Economic Zones; Regional Development.*

Pendahuluan

Dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan

How to cite:	Chrisna Satya Wardhana (2024) Ungkap Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mewujudkan Ekonomi Inklusif, (5) 4
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

daya saing dan memperkuat perekonomian nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, yang merupakan kawasan dengan keadaan tertentu yang ditetapkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Konsep KEK ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Fatimah, Simamora, & Silitonga, 2022).

Namun, di balik potensi ekonomi yang menjanjikan, terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana KEK dapat mewujudkan ekonomi inklusif, di mana manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Teori ekonomi regional telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Menurut teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) yang dikemukakan oleh Perroux (1955) dan diperbarui oleh Parr (2020), KEK dapat bertindak sebagai kutub pertumbuhan yang mendorong aktivitas ekonomi dan menarik investasi ke wilayah sekitarnya (Botha, 2023).

Dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, insentif fiskal, dan lingkungan bisnis yang kondusif, KEK dapat menarik perusahaan-perusahaan multinasional dan industri padat modal, yang pada gilirannya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam bentuk peluang kerja, permintaan barang dan jasa, serta pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat lokal. Namun, teori ini juga mengingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, manfaat ekonomi dari KEK cenderung terkonsentrasi di pusat kawasan dan kurang menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga dapat memperlebar ketimpangan regional (Botha, 2023).

Dalam upaya mewujudkan ekonomi inklusif, konsep pembangunan berbasis wilayah (*place-based development*) menawarkan perspektif yang relevan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi lokal, baik dalam bentuk sumber daya alam, budaya, maupun modal sosial, untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks KEK, hal ini berarti bahwa pengembangan kawasan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari masyarakat lokal, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan (Afida & Widodo, 2023).

Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah harus dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara kegiatan ekonomi di KEK dengan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan pariwisata, sehingga manfaat ekonomi dapat tersebar secara lebih luas.

Dalam mewujudkan ekonomi inklusif, KEK juga dapat memanfaatkan konsep ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memberikan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti perempuan, kaum muda, dan masyarakat adat. Dalam konteks KEK, hal ini dapat

dicapai melalui penerapan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada sumber daya lokal (Sachs et al., 2019).

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari KEK tidak hanya terbatas pada segelintir orang atau perusahaan besar, tetapi juga menyebar ke masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan, dan akses yang lebih baik terhadap layanan publik.

Meskipun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, terdapat kekhawatiran bahwa manfaat ekonomi dari KEK cenderung terkonsentrasi secara geografis dan sosial, sehingga dapat memperlebar ketimpangan dan mengakibatkan eksklusi ekonomi. Penelitian yang dilakukan di Nigeria menunjukkan bahwa KEK seringkali menghadapi tantangan dalam hal tata kelola yang buruk, korupsi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal, yang pada akhirnya menghambat tercapainya manfaat ekonomi yang inklusif (Alhassan, Stepannikova, & Chebukhanova, 2023).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan dapat menjadi katalis untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*das sollen*). Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan tersebut dengan realita yang terjadi di lapangan (*das sein*). Meskipun KEK berhasil menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut seringkali tidak tersebar secara merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau perusahaan besar. Di Malaysia menunjukkan bahwa KEK cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah dari masyarakat lokal tanpa memberikan manfaat yang setara, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial (Aggarwal, 2022).

Penelitian terbaru tentang potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mewujudkan ekonomi inklusif telah memberikan perspektif baru dan memperluas wawasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular dengan pengembangan KEK, menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang seringkali terabaikan dalam penelitian terdahulu. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang material, dan minimalisasi limbah, KEK dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata kepada masyarakat lokal (Godfrey et al., 2021).

Temuan ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang ada, yang sebelumnya cenderung berfokus pada aspek ekonomi semata. Selain itu, penelitian yang mengeksplorasi peran KEK dalam mendorong kewirausahaan lokal dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan aspek kunci dalam mencapai ekonomi inklusif. Dengan menggunakan data dari KEK di Cina, mereka menemukan bahwa keberhasilan KEK dalam mendorong kewirausahaan lokal sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti akses kepada pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi jaringan bisnis (Borowiecki & Makieła, 2019). Temuan ini memperkaya literatur yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang faktor-faktor yang memungkinkan KEK untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengungkap potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mewujudkan ekonomi inklusif. Studi ini melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur ilmiah terkait, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi dari lembaga pemerintah serta organisasi internasional. Pencarian literatur dilakukan melalui database online seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "Kawasan Ekonomi Khusus", "ekonomi inklusif", "pembangunan wilayah", dan "kebijakan ekonomi".

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2024, berbahasa Inggris atau Indonesia, dan berfokus pada isu-isu terkait potensi KEK dalam mendorong ekonomi inklusif. Setelah proses seleksi, literatur yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan metode analisis konten. Temuan dari berbagai literatur disintesis dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya ekonomi inklusif melalui pengembangan KEK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang dibahas berdasarkan tinjauan literatur terkini.

Hasil dan Pembahasan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Konsep KEK ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik potensi ekonomi yang menjanjikan, terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana KEK dapat mewujudkan ekonomi inklusif, di mana manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini adalah hasil penelitian literatur review ungkap potensi kawasan ekonomi khusus dalam mewujudkan ekonomi inklusif:

A. Peran Kawasan Ekonomi Khusus dalam mewujudkan ekonomi inklusif

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi besar untuk berperan sebagai pendorong ekonomi inklusif melalui kemampuannya dalam menarik investasi dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Menurut teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) yang dikemukakan oleh Perroux (1955) dan diperbarui oleh Parr (2020), KEK dapat bertindak sebagai kutub pertumbuhan yang menarik investasi dan perusahaan-perusahaan multinasional serta industri padat modal ke wilayah tersebut. Dengan menyediakan infrastruktur yang memadai,

insentif fiskal, dan lingkungan bisnis yang kondusif, KEK menciptakan iklim yang menguntungkan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan perusahaan-perusahaan besar di KEK selanjutnya dapat menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian wilayah sekitarnya. Efek pengganda ini dapat berbentuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan barang dan jasa dari sektor-sektor ekonomi lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya lapangan kerja baru, masyarakat lokal memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.



Gambar 1. Sebaran Kawasan Ekonomi Khusus
Sumber: Indonesia baik.id

Gambar ini menampilkan peta Indonesia yang menunjukkan sebaran 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kawasan-kawasan tersebut antara lain Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Lesung, Kendal, Singasari, Mandalika, Palu, Bitung, Likupang, Morotai, Sorong, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Gambar tersebut menyoroti bahwa Indonesia telah mengembangkan KEK dengan tujuan memanfaatkan keuntungan dari lokasi strategis untuk menarik investasi hingga Rp22 triliun.

Manfaat ekonomi dari KEK cenderung terkonsentrasi di pusat kawasan dan kurang menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya jika tidak ada intervensi kebijakan yang tepat². Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari kegiatan ekonomi di KEK dapat tersebar secara lebih luas dan merata kepada masyarakat lokal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat keterkaitan antara kegiatan di KEK dengan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan pariwisata.

B. Integrasi pembangunan berbasis wilayah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus

Untuk mewujudkan ekonomi inklusif melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penting untuk mengintegrasikan konsep pembangunan berbasis wilayah (place-based development) dalam pengembangan kawasan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi lokal, baik dalam bentuk sumber daya alam, budaya, maupun modal sosial, untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Aggarwal, 2022).

Dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya setempat, KEK dapat menawarkan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi investor dan wisatawan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Sebagai contoh, di Tanjung Lesung menunjukkan bahwa keberhasilan KEK dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sangat bergantung pada sejauh mana potensi wilayah tersebut dimanfaatkan secara optimal. Mereka menemukan bahwa KEK yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal cenderung memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dan merata bagi masyarakat sekitar (Batubara, Nasution, & Harahap, 2023).

Kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, pihak pengelola KEK dapat memahami kebutuhan, aspirasi, dan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat sekitar. Hal ini memungkinkan pengembangan KEK untuk diselaraskan dengan konteks wilayah tersebut, sehingga kegiatan ekonomi yang dijalankan di dalam kawasan dapat berintegrasi secara optimal dengan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal juga dapat mencegah terjadinya konflik atau penolakan dari masyarakat, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen mereka dalam mendukung keberhasilan KEK.

KEK Mandalika merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam konteks integrasi pembangunan berbasis wilayah, pengembangan KEK Mandalika tampak memanfaatkan potensi lokal berupa keindahan alam dan budaya setempat sebagai daya tarik utama. Pembangunan infrastruktur seperti jalan kawasan khusus yang menghubungkan area pantai dan bukit-bukit hijau di sekitarnya mengindikasikan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi di KEK dengan potensi pariwisata lokal.

Keberadaan 16 km garis pantai yang indah serta pemandangan alam pegunungan menjadi aset berharga yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Pengembangan KEK Mandalika tampaknya tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas ekonomi semata, tetapi juga berupaya untuk melestarikan dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis wilayah yang menekankan pentingnya memahami dan

mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

C. Penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam kawasan ekonomi khusus

Untuk mewujudkan ekonomi inklusif melalui Kawasan Ekonomi Khusus, penting untuk menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memberikan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti perempuan, kaum muda, dan masyarakat adat. Dalam konteks KEK, hal ini dapat dicapai melalui penerapan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada sumber daya lokal.

Salah satu aspek penting dalam penerapan ekonomi berkelanjutan di KEK adalah menjamin adanya peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa KEK tidak hanya menjadi enclave bagi perusahaan-perusahaan besar dan tenaga kerja dari luar daerah, tetapi juga memberikan akses dan peluang yang sama bagi masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan kaum muda (Gilmore, Andersson, & Memar, 2018).

Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan afirmatif, program pelatihan keterampilan, dan fasilitas pembiayaan yang terjangkau bagi usaha kecil dan menengah milik masyarakat lokal.

Selain itu, penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam KEK juga berarti bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan harus memperhatikan dampak lingkungan dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Asikin, Fadilah, Saputro, Aditia, & Ridzki, 2024). Beberapa KEK di dunia telah menghadapi tantangan terkait eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak-hak pekerja (Abagna, 2023). Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah perlu menetapkan standar dan regulasi yang ketat terkait praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis sumber daya lokal juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di KEK. UKM lokal dapat berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi perusahaan-perusahaan besar di KEK, serta menjadi daya tarik pariwisata dengan menawarkan produk-produk khas daerah setempat (Asikin & Fadilah, 2024). Dengan demikian, UKM lokal dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi inklusif yang berkelanjutan, di mana manfaat ekonomi dapat tersebar secara lebih luas kepada masyarakat lokal dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana.



Gambar 2. Suasana diskusi kawasan ekonomi khusus yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan

Sumber: Sez Indonesia

Gambar 2 menunjukkan suasana pameran atau diskusi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan di KEK, pameran atau diskusi seperti ini menjadi penting untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan pengembangan KEK.

Penerapan ekonomi berkelanjutan di KEK tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Melalui diskusi dan pameran seperti ini, masyarakat lokal dapat menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi di KEK, serta memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan mereka terlindungi. Selain itu, pelaku usaha dan investor juga dapat memperoleh informasi tentang praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta peluang untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal tanpa memberikan manfaat yang setara. Studi yang dilakukan oleh Namjudi et al di Malaysia mengungkapkan bahwa beberapa KEK cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah dari masyarakat lokal untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Najimudin, Dahlan, & Nor, 2023). Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan, tetapi juga dapat memicu konflik dan penolakan dari masyarakat lokal terhadap keberadaan KEK.

D. Upaya dan solusi untuk mewujudkan ekonomi inklusif di kawasan ekonomi khusus

Untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan dalam mewujudkan ekonomi inklusif melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diperlukan berbagai upaya dan solusi yang komprehensif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah adopsi prinsip ekonomi sirkular dalam pengembangan KEK. Penelitian yang

mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular dengan pengembangan KEK, menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang seringkali terabaikan .

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang material, dan minimalisasi limbah, KEK dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata kepada masyarakat lokal.



Gambar 3. Infografis ekonomi sirkular
Sumber: alinea.id

Gambar 3 memberikan gambaran mengenai konsep "*Circular Economy*" atau ekonomi sirkular yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dalam kegiatan industri. Infografis ini menjelaskan pentingnya menerapkan pendekatan sirkular untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor industri di Indonesia. Infografis menunjukkan bahwa terdapat lima sektor industri utama yang menjadi fokus penerapan ekonomi sirkular, yaitu industri makanan, industri minuman, konstruksi, peralatan listrik dan elektronik, serta peralatan transportasi.

Masing-masing sektor memiliki potensi besar untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan limbah melalui praktik-praktik seperti daur ulang material, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku terbarukan. Selain itu, infografis juga menyoroti manfaat ekonomi dan sosial dari penerapan ekonomi sirkular, seperti menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan emisi CO₂, dan mengurangi konsumsi energi. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi sirkular tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Gabusi & Boario, 2023).

Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat lokal dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi di KEK melalui pembentukan usaha baru atau pengembangan UKM yang sudah ada. Terkait dengan aspek tersebut, pemerintah juga perlu memastikan akses yang terjangkau bagi masyarakat lokal terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi jaringan bisnis. Kurangnya akses terhadap sumber daya ini menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi di KEK (Gabusi & Boario, 2023).

Dengan adanya akses yang memadai, masyarakat lokal dapat memperoleh modal usaha, meningkatkan keterampilan, dan membangun jaringan bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri atau menjadi pemasok barang dan jasa bagi perusahaan-perusahaan besar di KEK.



Gambar 4 Infografis kawasan ekonomi khusus berkontribusi bagi perekonomian bangsa
Sumber Indonesia baik.id

Mewujudkan ekonomi inklusif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan upaya dan solusi yang komprehensif seperti digambarkan dalam infografis tersebut. Salah satu upaya utama adalah memastikan bahwa KEK benar-benar berkontribusi bagi perekonomian bangsa dengan menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi. Hingga Januari 2020, terdapat 15 KEK yang telah direalisasikan di Indonesia, menyumbang Rp22,2 triliun investasi dan mempekerjakan 8.686 tenaga kerja.

Untuk memperluas manfaat KEK, lokasi KEK harus strategis dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, seperti area terluar, kawasan perbatasan, serta pusat-pusat industri dan perdagangan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan Gambar 6 juga menekankan perlunya memenuhi kriteria kelayakan seperti tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, didukung pemerintah daerah, dekat jalur perdagangan internasional, dan memiliki keunggulan sumber daya unggulan. Hal ini untuk memastikan KEK dapat berkembang secara efektif dan memberikan dampak ekonomi maksimal bagi daerah dan negara.

Kesimpulan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi besar untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan upaya-upaya komprehensif seperti mengintegrasikan prinsip pembangunan berbasis wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal, menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan

yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, serta memperkuat keterkaitan antara kegiatan ekonomi di KEK dengan sektor-sektor ekonomi lokal.

Selain itu, tantangan seperti konsentrasi manfaat ekonomi pada perusahaan besar dan tenaga kerja dari luar daerah, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal, serta kurangnya integrasi dengan ekonomi lokal harus diatasi melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi inklusif, seperti adopsi ekonomi sirkular, fasilitasi kewirausahaan lokal, dan peningkatan akses masyarakat lokal terhadap pembiayaan, pelatihan, serta jaringan bisnis.

BIBLIOGRAFI

- Abagna, Matthew Amalitinga. (2023). *Special Economic Zones and Local Economic Activities in Ethiopia*.
- Afida, Chabibah Nur, & Widodo, Cahyo Aji. (2023). The Location-Based Tax Incentives in Indonesia: Special Economic Zones. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 11–17.
- Aggarwal, Aradhna. (2022). *Special economic zones in the indonesia-malaysia-thailand growth triangle*. <https://doi.org/10.22617/TCS210449-2>.
- Alhassan, Tijani Forgor, Stepannikova, Oksana, & Chebukhanova, Lali. (2023). The role of special economic zones (SEZs) in achieving sustainable development in Nigeria. *E3S Web of Conferences*, 402, 13009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340213009>.
- Asikin, Muhamad Zaenal, & Fadilah, Muhamad Opan. (2024). Masa Depan Kewirausahaan dan Inovasi: Tantangan dan Dinamika dalam Era Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 303–310.
- Asikin, Muhamad Zaenal, Fadilah, Muhamad Opan, Saputro, Wahyu Eko, Aditia, Oriza, & Ridzki, Mohamad Maulana. (2024). The Influence Of Digital Marketing On Competitive Advantage And Performance of Micro, Small And Medium Enterprises. *International Journal of Social Service and Research*, 4(03), 963–970.
- Batubara, Tryana Ramadhany, Nasution, Juliana, & Harahap, Rahmat Daim. (2023). Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Simalungun. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3710–3729. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.1996>
- Borowiecki, Ryszard, & Makiela, Zbigniew Jan. (2019). Determinants of development of entrepreneurship and innovation in local areas of economic activity: a case study analysis. *Forum Scientiae Oeconomia*, 7(2), 7–24. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL7_NO2_1.
- Botha, Cornel. (2023). *The role of special economic zones in spatial planning in South Africa*. North-West University (South Africa).
- Fatimah, Zahara, Simamora, Bangun Paruntungan, & Silitonga, Frangky. (2022). Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata. *Jurnal Mekar*, 1(1), 7–13.
- Gabusi, Giuseppe, & Boario, Michele. (2023). 11 Industrial Policy and Special Economic Zones. ... A Must-Read for Scholars on Contemporary Myanmar and Fascinating for Anyone Interested in Broader Processes of Political and Economic Transformations.... *The Book Is a Welcome Addition to Studies of Contemporary Myanmar and Deserves to Be Read Widely.*, 157.
- Gilmore, Edward, Andersson, Ulf, & Memar, Noushan. (2018). How subsidiaries

- influence innovation in the MNE value chain. *Transnational Corporations*, 25(1), 73–100. <https://doi.org/10.18356/d3e73f33-en>. a
- Godfrey, Linda K., Nahman, Anton, Oelofse, Suzanna H. H., Trotter, Douglas, Khan, Sumaya, Nontso, Zintle, Magweregwe, Fleckson, Sereme, Busisiwe V, Okole, Blessed N., & Gordon, Gregory E. R. (2021). *The circular economy as development opportunity: Exploring circular economy opportunities across South Africa's economic sectors*. CSIR.
- Najimudin, Muhammad Fadhullullah, Dahlan, Nuarrual Hilal Md, & Nor, Mohd Zakhiri Md. (2023). Developing Special Economic Zones (Sezs) In Malaysia: A Land Use Planning Legal Perspective. *Planning Malaysia*, 21.
- Sachs, Jeffrey D., Schmidt-Traub, Guido, Mazzucato, Mariana, Messner, Dirk, Nakicenovic, Nebojsa, & Rockström, Johan. (2019). Six transformations to achieve the sustainable development goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805–814. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>.

Copyright holder:

Chrisna Satya Wardhana (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

